

STRATEGI DINAS TENAGA KERJA KOPERASI DAN UMKM DALAM PEMBERDAYAAN KOPERASI DI KOTA TANJUNGPINANG

**Oleh
Julita
Nim. 180565201091**

Abstrak

Sejak awal era kemerdekaan kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama Pemerintah Republik Indonesia. Selaras dengan itu, tumbuh kesadaran dan perhatian terhadap pengembangan ekonomi rakyat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan sekaligus mempercepat pemerataan. Salah satu implementasi dari misi yang menjadi tanggung jawab pemerintah adalah memberdayakan koperasi sebagai tulang punggung perekonomian rakyat. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan usaha, sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi usaha kuat, tangguh dan mandiri serta dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan. Objek penelitian ini adalah UMKM. Penelitian ini berfokus pada strategi dinas tenaga kerja koperasi dan usaha mikro kota Tanjungpinang. Sumber data yaitu primer, data pertama yang diperoleh langsung di lapangan melalui proses observasi dan wawancara. Sekunder data yang diperoleh dari pihak lain perpustakaan dan instansi yang terkait. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Strategi Organisasi visi misi suatu organisasi dalam hal ini sudah diterapkan Dinas Tenaga Kerja Koperasi Kota Tanjungpinang Dinas tenaga kerja koperasi dan usaha mikro benar mengadakan program pelatihan. sarana-prasarana seperti pelatihan, bantuan dana Dalam hal ini dinas tenaga kerja dan usaha mikro tetap melakukan pelatihan dan dengan mengetahui bahwa pelaku usaha mikro pasti banyak yang terkait dengan permodalan atura bawasanya pelaksanaan program pelatihan peserta wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan jenis dan tingkat program yang akan diikuti. Sedangkan SOP (standar oprasional prosedur) itu ya ke dinas, dan Standar operasional prosedur (SOP) dibidang koperasi itu ada pinjaman ke Lembaga Pengelola Dana Bergulir atau LPDB.

Kata Kunci : Strategi, Pemberdayaan, Usaha Mikro

**STRATEGY OF THE COOPERATIVE AND MSME MANPOWER OFFICE
IN EMPOWERING COOPERATIVES IN TANJUNGPINANG CITY**

**By
Julita
Nim. 180565201091**

Abstract

Since the beginning of the era of independence, the welfare of the people has been the goal of the Government of the Republic of Indonesia. In line with that, there is growing awareness and attention to the economic development of the people to encourage high economic growth and at the same time accelerate equity. One of the implementations of the mission that is the responsibility of the government is to empower cooperatives as the backbone of the people's economy. Empowerment of Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises is an effort made in the form of business climate growth, coaching and business development, so as to be able to strengthen itself into a strong, resilient and independent business and can compete with other business actors. This research uses a descriptive quality approach. Descriptive is a study carried out to find out independent variables, either one or more variables without making comparisons. The object of this study is MSMEs. This research focuses on the strategy of the manpower office of cooperatives and micro-enterprises of Tanjungpinang city. The source of data is primary, the first data obtained directly in the field through the observation and interview process. Secondary data obtained from other parties libraries and related agencies. From the results of the study, it can be concluded that the Organizational Strategy of the vision and mission of an organization in this case has been implemented by the Tanjungpinang City Cooperative Manpower Office, the Office of Cooperative Manpower and Micro-Enterprises is right to hold a training program. facilities such as training, financial assistance In this case, the manpower and micro enterprises office continues to conduct training and by knowing that micro-business actors must be related to capital atura bawasanya implementation The participant training program must meet the requirements according to the type and level of program to be followed. Meanwhile, the SOP (standard operational procedure) is yes to the office, and the Standard Operating Procedure (SOP) in the field of cooperatives is a loan to the Revolving Fund Management Institution or LPDB.

Keywords : Strategy, Empowerment, Micro Enterprises